

**REVIEW RENSTRA KEEMPAT
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK
TAHUN 2020-2024**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di Lingkup BPBL Lombok. Renstra BPBL Lombok disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui PERMEN KP Nomor: 17/PERMENKP/2020 tanggal 2 Juli Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 di bidang kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2024 ini BPBL Lombok melakukan Reviu Renstra BPBL Lombok Tahun 2020-2024 dalam rangka pemantauan, pembaharuan serta penyesuaian terhadap program dan kegiatan yang masih relevan dengan kebijakan yang ada pada tahun berjalan sehingga hasil reviu ini dapat dipedomani serta dilaksanakan sebaik-baiknya.

Lombok Barat, 12 Februari 2024

Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Wawan Cahyono Ashuri, S.Pi.,M.P.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tahap terpenting dalam RPJPN 2005-2025 adalah periode tahun 2020-2024 karena merupakan tahap terakhir sehingga akan mempengaruhi pencapaian target akhir RPJPN 2005-2025 yaitu mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara –negara berpenghasilan menengah keatas (upper-middle income country) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada Visi Presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan Nawacita Kedua yang merupakan misi presiden.

Perikanan budidaya diharapkan mampu memberikan dampak peningkatan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan (terutama pembudidaya ikan), mewujudkan ketahanan dan keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan serta berkontribusi dalam peningkatan PDB Nasional. Oleh karena itu penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2020-2024 secara nasional. Selanjutnya Renstra DJPB harus mampu diterjemahkan oleh unit pelaksana teknis lingkup DJPB termasuk oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok yang dituangkan dalam Rencana Strategi BPBL Lombok 2020-2024 karena Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (BPBL Lombok) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang budidaya laut yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

BPBL Lombok mempunyai wilayah kerja pendampingan teknis meliputi tiga provinsi yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali dan Nusa Tenggara Timur. Luasnya cakupan wilayah kerja ini dan kompleksitas permasalahan seputar budidaya laut dengan semua dinamikanya baik dinamika internal maupun eksternal dalam skala local, regional, nasional maupun global telah memacu BPBL Lombok-sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya- untuk berbenah diri dengan meningkatkan kinerja yang diamanahkan secara maksimal dan optimal serta efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya di Wilayah kerja Prov. Bali, Prov. NTB dan Provinsi NTT diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 2020 - 2024 yang mengacu pada Restra DJPB. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kegiatan pemanfaatan potensi budidaya laut untuk meningkatkan perekonomian para pembudidaya ikan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja. Dokumen Renstra akan menjadi acuan kegiatan BPBL Lombok 5 tahun kedepan bagi stakeholder terkait. Restra kemudian dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL).

1.2 KONDISI UMUM

A. Pengembangan Komoditas Budidaya Laut

BPBL Lombok saat ini terus fokus pada pengembangan komoditas budidaya laut yang menjadi unggulan. Ada 5 (lima) komoditas yang dikembangkan BPBL Lombok yakni : (1) Ikan bersirip (Finfish) seperti Bawal Bintang (*Trachinotus Blochii*) dan Kakap putih (*Lates Calcarifer*) ; (2) Abalone (*Haliotis asinina*, *Haliotis squamata*, dan *Hybrid Haliotis Ninamata*) ; (3) Tiram Mutiara (*Pinctada maxima*) ; (4) Rumput Laut (*Kappaphyeus alvarezii*) kultur jaringan ; (5) ikan hias (Clown Fish) ;

Untuk mendukung kegiatan produksi komoditas-komoditas tersebut, BPBL Lombok dilengkapi dengan prasarana dan sarana serta fasilitas di 2 (dua) lokasi baik di Sekotong Lombok Barat maupun di Gerupuk Lombok Tengah. Kegiatan pengembangan Budidaya Perikanan Laut yang dilakukan di Sekotong Lombok Barat adalah (1) Pengelolaan Induk/Calon Induk dan produksi benih Bawal Bintang, Kakap putih dan ikan hias; (2) Pengelolaan Induk/Calon Induk dan produksi benih kekerangan : Tiram mutiara dan abalone; (3) Laboratorium Kultur jaringan rumput laut ; (4) Produksi pakan alami skala laboratorium dan massal; dan (5) Pengujian Laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

Adapun kegiatan pengembangan Budidaya Perikanan Laut yang dilakukan di Gerupuk Lombok Tengah adalah (1) Perbanyak bibit rumput laut hasil kultur Jaringan; (2) Pembenuhan dan Pendederan Bawal Bintang dan Kakap Putih (3) Pembenuhan dan Pendederan Tiram Mutiara dan (4) Produksi Pakan Alami.

B. Gambaran Umum Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 - 2019

1. Produksi benih ikan laut tahun 2015-2019 terus meningkat dengan kenaikan rata-rata tiap tahun mencapai 20 % . Pada tahun 2015 produksi benih ikan laut di BPBL Lombok sebanyak 452.005 ekor (terdiri dari benih ikan bawal bintang, kakap putih, ikan hias, abalone dan tiram mutiara), sedangkan pada tahun 2019 naik mencapai 1.058.650 ekor yang terdiri

dari benih finfish (bawal bintang, kerapu dan kakap putih) sebanyak 778.500 ekor, ikan hias (laut) sebanyak 2.950 ekor, abalon sebanyak 18.200 ekor dan tiram mutiara sebanyak 259.000 ekor. Mulai tahun 2016 BPBL Lombok memberikan bantuan benih ke masyarakat dan terus meningkat jumlahnya setiap tahunnya pada tahun 2016 sebanyak 160.000 ekor dan pada tahun 2019 sebanyak 771.000 ekor terdiri benih bawal bintang, kakap putih, dan tiram mutiara.

2. Produksi Calon Induk Unggul 2015-2019 setiap tahunnya 3800-4125 ekor yang digunakan sebagai perbaikan kualitas induk yang digunakan untuk produksi benih bermutu.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang di bebaskan setiap tahunnya berkisar 478.000.000-728.000 dari hasil produksi benih dan seleksi produksi calon induk.
4. Kegiatan perekayasa bidang budidaya laut di BPBL Lombok selama periode 2015-2019 telah menghasilkan paket teknologi budidaya laut meliputi komoditas budidaya yang dikembangkan di BPBL Lombok meliputi kegiatan pembenihan, pendederan ikan bawal bintang, kerapu dan kakap putih serta pembesaran ikan di keramba jaring apung (KJA), pembenihan dan pendederan abalon, pembenihan dan pendederan tiram mutiara, pembenihan dan pendederan ikan hias clown fish, pembibitan aklimatisasi dan kebun bibit rumput laut kultur jaringan, kegiatan pakan alami.
5. Kegiatan pengawasan pembudidaya ikan di wilayah kerja pengawasan pembudidayaan ikan BPBL Lombok meliputi Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali. Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan tersebut meliputi kegiatan pembinaan masyarakat melalui pengawasan dan pemberdayaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Disamping itu juga dilakukan pendampingan terhadap unit-unit pembenihan ikan yang ada di wilayah kerja baik milik pemda provinsi/kabupaten/kota maupun UPR terkait Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB). Selaian pengawasan CBIB dan CPIB, kegiatan mengawasi oleh BPBL Lombok juga meliputi kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/minapolitan/industrialisasi perikanan. Kawasan budidaya/minapolitan/industrialisasi perikanan di Provinsi Bali dengan komoditas rumput laut), di Provinsi NTB meliputi Sumbawa, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat dengan komoditas udang vanamae dan rumput laut) dan di Provinsi NTT dengan komoditas udang vanamae dan rumput laut).
6. Kegiatan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan meliputi (1) pengujian sampel dengan sejumlah parameter yakni kualitas air, bakteriologi, Virus (VNN, Iridovirus, Vibrio, IMNV, WSSV, IHNV dan TSV), parasit, residu dan histologi. (2) monitoring daerah sebaran dan perkembangan penyakit ikan. (3) Sistem Manajemen Mutu (Akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2008). (4) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan. (5). Uji Banding. (6) Temu Lapangan dan Pengujian Penyakit Ikan dan (7) menginisiasi koordinasi dan membentuk Jejaring Lab Kesehatan dan Ikan Nasional.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

a. Ketersediaan Lahan Perikanan Budidaya

Ketersediaan lahan pengembangan perikanan budidaya meliputi: (a) budidaya laut, (b) budidaya air payau, (c) budidaya air tawar. Luas lahan potensial untuk budidaya ikan tercatat sekitar 12 juta hektar dengan rincian: 8,4 juta hektar untuk budidaya laut; 1,2 juta hektar untuk budidaya air payau, dan 2,2 juta hektar untuk budidaya air tawar.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2004, Indonesia diperkirakan memiliki potensi indikatif sebesar 8,4 juta ha perairan laut, dimana 3,8 juta ha merupakan potensi efektif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya laut. Terdiri dari 775 ribu ha untuk pengembangan KJA ikan/lobster/abalone, 37,2 ribu ha untuk pengembangan karamba tancap ikan, 769,5 ribu ha untuk pengembangan budidaya rumput laut, 4,7 juta ha untuk pengembangan budidaya kekerangan, 174,6 ribu ha untuk pengembangan budidaya teripang dan 1,9 juta ha untuk pengembangan budidaya tiram mutiara.

Potensi lahan budidaya air tawar terdiri dari lahan budidaya kolam, sawah (mina padi) dan di perairan umum yang terdiri dari danau, rawa dan sungai. Untuk potensi lahan budidaya di kolam, dihitung berdasarkan asumsi luas lahan yang mendapat pasokan air irigasi teknis sebagai sumber airnya. Dengan memanfaatkan potensi sekitar 20% pasok air irigasi tersebut, diperkirakan luas potensi lahan untuk budidaya di kolam adalah sebesar 528.700 ha. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2003, potensi lahan untuk pengembangan budidaya di kolam yang terluas adalah di pulau Jawa, yaitu propinsi Jawa Timur 92.400 ha, diikuti Jawa Barat 86.700 ha dan Jawa Tengah 83.200 ha. Di wilayah Sumatera, potensi lahan budidaya tawar yang terluas adalah NAD 29.000 ha, Sumatera Utara 31.800 ha dan Sumatera Barat 24.300 ha. Di Indonesia bagian Timur, potensi lahan untuk kolam yang terbesar adalah Sulawesi Selatan 34.800 ha.

Potensi lahan budidaya ikan di perairan umum, meliputi budidaya di danau, rawa dan sungai. Budidaya perikanan di perairan umum harus dilakukan secara ramah lingkungan, produktif, serta sesuai dengan penggunaan perairan umum untuk keperluan lainnya. Sedangkan potensi lahan budidaya di sawah atau lebih dikenal dengan sebutan budidaya mina padi, masih sangat besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat potensi sawah untuk pengembangan budidaya minapadi sekitar 1,5 juta ha.

1. Tenaga Kerja Perikanan Budidaya

Jumlah penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan merupakan potensi tenaga kerja perikanan budidaya, terlebih lagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Sampai pada tahun 2014 terdapat lebih dari 4 juta orang menggantungkan hidup pada kegiatan perikanan budidaya. Jumlah tenaga kerja tersebut diprediksi akan terus bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan angkatan kerja.

Apabila jumlah penduduk yang besar dapat ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya mengenai perikanan budidaya, maka ini dapat secara langsung menunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Selain itu, peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi perikanan menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja terdidik di bidang perikanan budidaya akan semakin tinggi.

2. Teknologi Perikanan Budidaya

Banyak paket teknologi penelitian dan perekayasaannya di bidang perikanan budidaya yang dapat dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas perikanan budidaya secara efisien. Berbagai spesies ikan komersial sudah berhasil di budidayakan seperti kerapu, kakap, ikan hias. Program *broodstock center* perikanan budidaya telah menghasilkan induk varietas unggul berbagai spesies dan benih berkualitas tinggi. Keberhasilan dalam produksi vaksin, probiotik dan *immunostimulan* untuk ikan/udang, diterbitkannya Standar Nasional Indonesia bidang perikanan budidaya, serta tersebarnya laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan utamanya untuk deteksi dini penyakit ikan yang dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi menambah optimis usaha di bidang perikanan budidaya akan terus tumbuh.

3. Potensi Pertumbuhan Penduduk, Daya Beli dan Permintaan Pasar

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237,56 juta orang, dengan laju pertumbuhan penduduk sebanyak 1,49 persen per tahun. Jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk perikanan khususnya perikanan budidaya. Pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yang akan berimplikasi pada peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, termasuk komoditas perikanan.

Masih rendahnya konsumsi masyarakat akan produk perikanan membuka peluang bagi peningkatan volume produksi dan diversifikasi produk perikanan di Indonesia. Namun hal tersebut harus diikuti dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya

makan ikan serta menjamin kualitas produk perikanan yang aman dikonsumsi sesuai dengan permintaan pasar.

Produk perikanan Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional seiring dengan pemberlakuan pasar bebas di era globalisasi. Terbukanya pasar luar negeri harus disertai dengan upaya pemenuhan persyaratan negara pengimpor terutama terkait dengan keamanan pangan. Perikanan Budidaya terus dibangun dan dikembangkan dengan pola pikir industrialisasi, guna meningkatkan daya saing serta nilai tambah dalam menghadapi era pasar global, serta tuntutan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih bertanggung jawab.

B. Permasalahan

Pembangunan perikanan budidaya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan:
 - a. Konflik kepentingan pemanfaatan tata ruang lahan dan air dikarenakan kawasan perikanan budidaya seringkali tidak dilindungi pemanfaatannya dengan peraturan tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (baik RZWP-3-Katau RTRW), sehingga banyak lahan budidaya ikan yang dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya;
 - b. Belum optimalnya penerapan biosecurity, penanganan penyakit ikan, penggunaan vaksin dan pengendalian lingkungan
 - c. Kualitas dan kuantitas laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang belum memadai;
 - d. Infrastruktur perikanan budidaya belum memadai, seperti saluran irigasi (primer, sekunder, tersier), jalan produksi, dan wadah budidaya (kolam, KJA, tambak).
2. Pengelolaan perbenihan ikan:
 - a. Belum terbangunnya sistem logistik perbenihan yang menyebabkan distribusi induk dan benih belum sesuai dengan kebutuhan setiap daerah;
 - b. Belum optimalnya penerapan teknologi pembenihan yang dapat memproduksi benih dengan kualitas dan kuantitas tinggi serta ramah lingkungan;
 - c. Belum banyak tersedia benih ikan lokal bernilai ekonomis tinggi yang diproduksi dari unit pembenihan;
3. Pengelolaan pakan dan obat ikan:
 - a. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku pakan impor yang menyebabkan harga pakan mahal di tingkat pembudidaya;

- b. Pembudidaya ikan masih bergantung pada pakan pabrikan karena pembudidaya belum dapat memproduksi pakan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - c. Kurangnya pemanfaatan dan penyediaan pakan alami sebagai alternatif pakan buatan;
 - d. Masih banyaknya obat ikan tidak berizin yang beredar serta masih lemahnya pengawasan peredaran obat.
4. Pengelolaan produksi dan usaha:
- a. Akses permodalan dan perlindungan usaha budidaya skala kecil masih terbatas;
 - b. Kurangnya sosialisasi informasi terkait prosedur, komoditas, dan lokasi investasi perikanan budidaya;
 - c. Kurangnya harmonisasi regulasi perizinan dan pengawasan di sentra kawasan budidaya;
 - d. Asuransi mandiri perikanan budidaya belum berkembang.
5. Sumber daya manusia dan kelembagaan:
- a. Kompetensi SDM pembudidaya skala kecil / menengah belum siap untuk adaptif terhadap peningkatan teknologi;
 - b. Kurangnya kompetensi SDM bagi Aparatur Sistem Negara;
 - c. Kelembagaan pembudidaya ikan belum terkelola dengan baik dan belum berorientasi pasar;
 - d. Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia;
 - e. Kelembagaan organisasi pemerintah di daerah belum secara komprehensif mencakup semua aspek pengelolaan perikanan budidaya.
6. Penerapan standarisasi dan sertifikasi perikanan budidaya:
- a. Pelaksanaan sistem standarisasi belum sinkron dengan kebutuhan pembudidaya dan kebutuhan pasar;
 - b. Belum dirasakan adanya insentif dari sertifikasi CBIB sehingga kesadaran untuk menerapkan persyaratan CBIB belum merata;
 - c. Unit pembenihan yang bersertifikat CPIB masih terbatas;
 - d. Masih terbatasnya unit produksi pakan yang bersertifikat CPPIB terutama unit produksi pakan mandiri;

- e. Digitalisasi untuk usaha perikanan budidaya belum optimal.
- 7. Regulasi tata kelola perikanan budidaya masih belum sepenuhnya optimal untuk mengakselerasi pembangunan perikanan budidaya di pusat dan di daerah.
- 8. Pendataan perikanan budidaya belum sepenuhnya menjangkau semua sentra budidaya sehubungan dengan masih terbatasnya jumlah dan sebaran enumerator serta sistem pendataan dalam tahap transisi dengan pola satu data.

1.4 LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan strategis yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun sektor perikanan budidaya sebagaimana yang teruang dalam Renstra DJPB 2020-2024 antara lain:

1. Posisi geografis Indonesia sangat strategis karena terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Lokasi ini sangat menguntungkan karena menjadi titik persimpangan jalur perdagangan internasional baik dari laut dan udara yang membuat Indonesia menjadi negara yang berpotensi perekonomiannya baik.
2. Pertumbuhan populasi penduduk yang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 1,02% per tahun pada periode 2020-2024 atau meningkat dari 271,06 juta orang pada tahun 2020 menjadi 282,24 juta orang pada tahun 2024 (BPS, Bappenas, UN Population Fund 2013) akan berimplikasi pada peningkatan kebutuhan ikan, dari 12,18 juta ton pada tahun 2020 menjadi 13,7 juta ton (KKP 2019). Dalam hal ini, perikanan budidaya merupakan salah satu sektor yang paling mungkin untuk ditingkatkan produksinya untuk memenuhi kebutuhan ikan tersebut, mengingat produksi perikanan tangkap yang cenderung mengalami stagnasi.
3. Pasar bebas (*free trade*). Dampak dari globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional adalah mendorong peningkatan arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barriers*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu Indonesia untuk semakin meningkatkan persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan agar produknya dapat diterima oleh pasar internasional.
4. Preferensi masyarakat domestik dan global telah mengalami pergeseran dari konsumsi daging merah menjadi daging putih/ikan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan bagi produk perikanan budidaya (DJPB 2017).
5. Perubahan pola tata niaga perikanan budidaya dengan digitalisasi. Era globalisasi dan transformasi industri 4.0 memberikan peluang bagi bisnis perikanan budidaya untuk beralih dari aktivitas *business-as-usual* menjadi aktivitas digitalisasi. Teknologi digital akan mengefisiensi mata rantai pasok industri perikanan dan pemberdayaan bagi pembudidaya

kecil. Yang perlu diperkuat adalah kesiapan usaha budidaya skala kecil/menengah untuk adaptif terhadap *startup* aplikasi yang semakin dinamis.

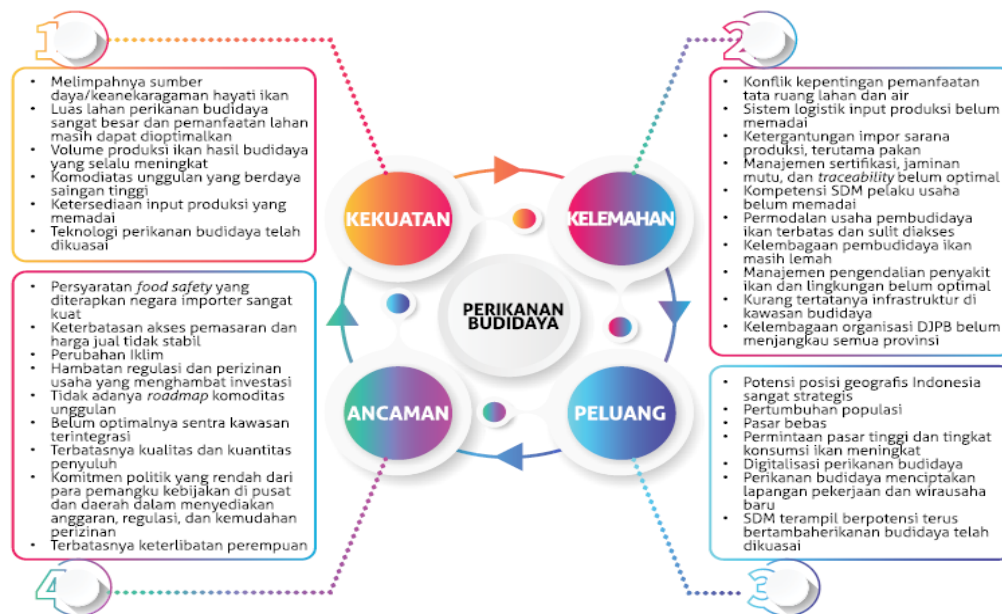
6. Perikanan budidaya menciptakan lapangan pekerjaan dan kewirausahaan baru. Kondisi eksisting Rumah Tangga Perikanan berjumlah 1,68 juta RTP (KUSUKA 2019). Dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, perikanan budidaya berpotensi mampu menyerap tenaga kerja. Bonus demografi dengan banyaknya populasi kaum pemuda adalah sumber *entrepreneur* serta tenaga kerja di masa datang, sehingga perlu dipersiapkan untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan yang nyata kepada pembangunan ekonomi nasional. Semakin banyak wirausahawan muda yang memulai bisnis di sektor budidaya ikan, maka semakin banyak pula terobosan baru yang menjadikan sektor ini lebih maju.
7. SDM terampil berpotensi terus bertambah, ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi yang memiliki program studi / jurusan perikanan budidaya. Saat ini, terdapat 45 Perguruan Tinggi (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi/Politeknik yang memiliki Fakultas Perikanan (Quiper Campus 2019) dan menghasilkan lulusan terampil dan handal yang dapat bersaing di era digital.

Adapun lingkungan strategis yang menjadi tantangan bagi perikanan budidaya Indonesia, diantaranya:

1. Penetapan persyaratan oleh negara-negara importir bagi produk pangan yang masuk ke negaranya, antara lain bebas residu antibiotik, bakteri dan bahan kimia berbahaya lain, ketelusuran (*traceability*), dan sertifikasi.
2. Sebagian besar ekspor perikanan budidaya (ikan dan rumput laut) masih dalam bentuk *fresh*/bahan baku dan bukan dalam bentuk olahan sehingga nilai tambah yang diperoleh dari aktivitas perikanan budidaya masih sangat kecil.
3. Perubahan iklim, yang mengakibatkan siklus musim tidak menentu sehingga perubahan pola tanam dan masa pemeliharaan yang semakin lama; perubahan suhu permukaan air menyebabkan blooming alga, penurunan DO, dan peningkatan kejadian penyakit; kekeringan menyebabkan kurangnya kadar oksigen dan perubahan salinitas sehingga banyak kasus kematian ikan; dan hujan terus-menerus menyebabkan kenaikan permukaan air, *upwelling*, banjir, kehilangan area pelindung.
4. Kerentanan ekonomi global dan nasional terhadap kejadian luar biasa yang melanda dunia internasional, seperti pandemi virus Covid-19 yang berdampak negatif bagi keberlangsungan dunia usaha, termasuk perikanan budidaya.
5. Regulasi lintas sektor masih lemah dan asimetris, baik *inter* maupun *intra* sektoral, serta perizinan usaha yang cenderung menghambat usaha perikanan budidaya sehingga belum menjamin keamanan investasi untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di

Indonesia. Selain itu, pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam tata kelola perikanan budidaya belum optimal.

6. Belum optimalnya sentra/kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi, sehingga aktivitas hulu dan hilir perikanan budidaya belum sejalan
7. Ketersediaan penyuluh yang masih kurang merata di berbagai wilayah serta terbatasnya kompetensi penyuluh sehingga pembudidaya belum mendapatkan pemahaman untuk mengaplikasikan teknologi inovatif terbaru.
8. Komitmen politik yang rendah dari para pemangku kebijakan dalam bentuk kurangnya dukungan anggaran, regulasi, dan kemudahan perizinan.
9. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas perikanan budidaya masih terbatas (paruh waktu dan berpenghasilan rendah), serta besarnya peran pria dalam menentukan aktivitas perempuan dalam keluarganya.



Gambar 1. Potensi, Permasalahan, Peluang, dan Tantangan Perikanan Budidaya

(Sumber : Renstra DJPB 2020-2024)

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu : “Terwujudnya masyarakat perikanan budidaya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Misi

Misi yang akan dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok sejalan dengan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yaitu :

1. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional.
2. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan

Tujuan pembangunan perikanan budidaya yaitu :

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budidaya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya;
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan kawasan perikanan budidaya secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan.

3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di UPT BPBL Lombok, yakni meningkatkan kinerja reformasi birokrasi sebagai UPT Dirketorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai dijabarkan dalam lima perspektif dengan masing-masing IKU sebagai berikut :

1. Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah Nilai PNBP Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat;
 - b. Persentase Bantuan Benih Ikan yang disalurkan ke masyarakat;
 - c. Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi;
 - d. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat;
 - e. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan ke masyarakat;
 - f. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang dimanfaatkan;
 - g. Persentase Diseminasi Teknologi Budi Daya Ikan;
 - h. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang disalurkan.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang kawasan dan kesehatan ikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Persentase layanan pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan;
 - b. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi;
 - c. Persentase Pengujian Antimikrobial Resistance (AMR).
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran kegiatan ini adalah :
 - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup BPBL Lombok
 - b. Hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;

- c. Prosentase penyelesaian LHP BPK atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- d. Nilai PM SAKIP Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- e. Prosentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- f. prosentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar;
- g. Nilai IKPA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- h. NKA Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok,
- i. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- j. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok;
- k. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan data KUSUKA;
- l. Indeks pengelolaan kepegawaian;
- m. Nilai Pengawasan Kearsipan;
- n. Persentase Layanan Perkantoran BPBL Lombok.

BAB III

REVIEW RENSTRA TAHUN 2024 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK

Review atas Rencana Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok tahun 2020-2024 terkait Perubahan target indikator kinerja dari penjabaran sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan kebutuhan yang ada di BPBL Lombok tahun 2024 yang tertuang dalam DIPA SATKER BPBL Lombok Nomor : **SP DIPA – 032.04.2.567762/2024 tanggal 24 Novemper 2023 Satker 567762 DS:3337-2711-7298-0554**

Berikut adalah hasil review ke-4 atau review pada tahun 2024 atas Indikator kinerja dan target pada Rencana Strategis BPBL Lombok Tahun 2020-2024 untuk dituangkan dalam perjanjian kinerja Kepala BPBL Lombok Tahun Anggaran 2024.

	SEMULA	MENJADI
PROGRAM KEGIATAN	Pengelolaan Perbenihan Ikan	Pengelolaan Perbenihan Ikan
	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
SASARAN STRATEGIS	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut

		Lombok
	SEMULA	MENJADI
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	Tata Kelola Pemerintahan Yang baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

Pada Tahun 2024 beberapa Indikator Kinerja Utama juga mengalami perubahan. Berikut adalah hasil Reviu atas Indikator Kinerja dan Target pada Rencana Strategis BPBL Lombok 2020-2024 untuk penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala BPBL Lombok TA 2024.

Semula :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN					KETERANGAN		
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok Meningkat	1	Nilai PNBP yang diperoleh (Rp)	637,780,000	740,335,000	767,526,000	762,305,000	830,000,000	
		2	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang	1	24	30	75	24	Pada Tahun 2023 terjadi perubahan satuan pengukuran dari unit menjadi prosentase

		Disalurkan (Persen)						
	3	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	74900 0	73500 0	7506 67	100	82000 0	Pada Tahun 2023 terjadi perubahan satuan pengukuran dari ekor menjadi prosentase
	4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	-	-	-	100	-	Pada Tahun 2023 BPBL Lombok mendapat tanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan calon induk
	5	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	3,600	2400	1379	100	2400	Pada Tahun 2023 terjadi perubahan satuan pengukuran dari ekor menjadi prosentase
	6	Persentase Keberhasilan Pengembangan Benih pada Komoditas Lobster (Persen)				100		Merupakan IKU baru pada Tahun 2023 karena adanya komoditas lobster yang pada tahun 2023 ini akan dipijahkan dari larva menjadi minimal mencapai fase <i>phyllosoma</i>
	7	Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi (Persen)				100		Merupakan IKU baru pada Tahun 2023 karena adanya program baru DJPB dimana BPBL Lombok menjadi salah satu UPT yang memiliki produksi bibit rumput laut kultur jaringan
4		Terkelolanya Pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan						
	8	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang Disalurkan (Persen)	6	22	17	100	22	Pada Tahun 2023 terjadi perubahan satuan pengukuran dari paket menjadi prosentase
	9	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan				100		Merupakan IKU baru pada Tahun 2023 yang menjadi tanggung jawab BPBL Lombok

			(Persen)						
		10	Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan (Persen)				100		Merupakan IKU baru pada Tahun 2023 karena adanya komoditas lobster yang pada tahun 2023 ini sedang dikembangkan
		11	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)				100		Pada Tahun 2023 BPBL Lombok mndapat tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sarana dan parasan budidaya ikan hias
5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	12	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	2,000	2000	1.339	100	2,600	Pada Tahun 2023 terjadi perubahan satuan pengukuran dari sampel menjadi prosentase
		13	Persentase Pengujian Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)			50	100	50	Pada Tahun 2023 terjadi perubahan satuan pengukuran dari sampel menjadi prosentase
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Indeks)	72	73	80	81	72	
		15	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)			76	76	76	
		16	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker	100	100	100	100	100	

		BPBL Lombok (Persen)						
	17	Nilai PM SAKIP BPBL Lombok (Nilai)	90	90	92	75	90	
	18	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen)	60	65	70	75	60	
	19	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai)	88	89	89	93,75	89	
	20	Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok (Nilai)	85	85	81	82	85	
	21	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Persen)		72,5	75	77,5	72,5	
	22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok (Persen)		72,5	75	77,5	72,5	
	23	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)				80	-	Merupakan IKU baru pada Tahun 2023 dalam rangka program perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

		24	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)				3		Merupakan IKU baru pada Tahun 2023 dalam rangka pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai
		25	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok (Nilai)			75	75	75	

Menjadi :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN					KETERANGAN
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Ekonomi sektor perikanan budidaya BPBL Lombok Meningkatkan	1	Nilai PNBP yang diperoleh (Rp)	637,780,000	740,335,000	767,526,000	762,305,000	781.085.000	
		2	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan (Persen)	1	24	30	75	75	
		3	Persentase Bantuan Benih yang Disalurkan (Persen)	749000	735000	750667	100	75	
		4	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan (Persen)	-	-	-	100	75	
		5	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	3,600	2400	1379	100	3476	Pada Tahun 2024 terjadi perubahan satuan pengukuran dari persentase menjadi ekor

4

Terkelolanya
Pengelolaan
perikanan
budidaya
yang
berkelanjutan

6	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat (persen)				-	75	Pada Tahun 2024, BPBL Lombok mendapat tanggung jawab menyalurkan bantuan bibit rumput laut kepada masyarakat
7	Persentase Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan Skala Intermediate yang Diproduksi (Persen)				100	-	Pada Tahun 2024 kegiatan bibit rumput laut kultur jaringan skala intermediate tidak masuk dalam perjanjian kinerja Tahun 2024
8	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar yang Dimanfaatkan (Persen)	6	22	17	100	100	Pada Tahun 2024 terjadi perubahan indikator kinerja dari sarana dan prasarana bioflok menjadi sarana dan prasarana budidaya air tawar
9	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)				100	100	Pada Tahun 2024 terjadi perubahan indikator kinerja dari diseminasi teknologi pembesaran ikan menjadi diseminasi teknologi Budi Daya Ikan
10	Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan (Persen)				100	-	Pada Tahun 2024 kegiatan Persentase Model Usaha Pembesaran Budidaya Lobster yang Dikembangkan tidak masuk dalam perjanjian kinerja Tahun 2024
11	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Hias yang Disalurkan (Persen)				100	100	

5	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kesehatan Ikan	12	Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan yang Diuji (Persen)	2,000	2000	1.339	100	100	Pada Tahun 2024 terjadi perubahan indikator kinerja dari Persentase Kesehatan Ikan dan Kualitas lingkungan yang diuji menjadi kesehatan ikan dan kualitas lingkungan yang diuji
		13	Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)			50	100	100	
		14	Ruang Lingkup Laboratorium yang terakreditasi (parameter)					7	Pada Tahun 2024, BPBL Lombok mendapat tambahan IKU terkait ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok	15	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Lombok (Indeks)	72	73	80	81	85	
		16	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)			76	76	76	
		17	Persentase Penyelesaian LHP BPK Atas Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok (Persen)	100	100	100	100	100	
		18	Nilai PM SAKIP BPBL Lombok (Nilai)	90	90	92	75	82	
		19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	60	65	70	75	80	

		Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Lombok (Persen)						
	20	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPBL Lombok (Nilai)	88	89	89	93,75	93,76	
	21	Nilai Kinerja Anggaran BPBL Lombok (Nilai)	85	85	81	82	86	
	22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok (Persen)		72,5	75	77,5	80	
	23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BPBL Lombok (Persen)		72,5	75	77,5	80	
	24	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)				80	80	
	25	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)				3	4	
	26	Nilai Pengawasan Kearsipan BPBL Lombok (Nilai)			75	75	75	
	27	Persentase Layanan perkantoran BPBL Lombok					80	Pada Tahun 2024, BPBL Lombok mendapat tambahan IKU terkait layanan perkantoran

									BPBL Lombok
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

Demikian hasil review Renstra sebagai acuan perubahan target IKU pada tahun 2024.